

FAKTOR PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK GUS DUR TERHADAP IDE PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-ISRAEL

Widyasmoro Priatmojo

NIM 20120510276

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar
Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI.Yogyakarta 22183
Email: vandiasrivay@yahoo.co.id

Abstract

Abdurrahman Wahid was a politician which had differences compared to others. Based on his level, people did not understand well about him. However he was a good person taking assertively any consequences. That was made him popular with the general public. At the time he had started to declare establishment of diplomatic relation Indonesia-Israel, people were against with curse. Abdurrahman Wahid were considered as drunken god because of irrational decision. However it gave strong impact to Indonesia's stand toward Israel-Palestine conflict. This article tried to identify why his political thought appeared and aimed. The political thought should be determined by influences. That was what article explained. To address this problem, the analysis frame was political thought concept and political attitude theory which described factors of influences. The study will be organized on Background, internal factors, external factors, and Gus Dur's political thought.

Keywords: pengaruh, pemikiran, hubungan, Gus Dur, Indonesia, Israel, Palestina

Pendahuluan

Dalam sejarah politik luar negeri, Indonesia memiliki prinsip bebas aktif. Prinsip tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari akibat isu perang dingin yang terjadi ketika itu dimana munculnya dua blok yang sangat kuat. Maka itu implementasinya adalah Indonesia dengan tegas menolak kedua blok tersebut dengan membuat blok sendiri bernama GNB (Gerakan Non-Blok) (Widjaja, 1986). Selain itu Indonesia juga banyak berperan dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, APEC, OPEC, OKI, ARF, WTO, dan lainnya. Politik bebas aktif kemudian juga dimaknai dengan penegasan bahwa Indonesia merupakan negara yang menentang sebuah penjajahan yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut diakibatkan Indonesia telah merasakan pahitnya sebuah penindasan yang dilakukan oleh bangsa penjajah khususnya bangsa Belanda ketika itu (Ratna Shofi Dkk, 1998).

Penjajahan bagi pandangan masyarakat Indonesia merupakan sebuah kejahatan yang tidak akan pernah terlupakan hingga lahirnya gerakan atas inisiatif Indonesia seperti GNB, pemberian kecaman terhadap negara-negara penjajah dan berbagai peran lain sebagai implementasi dari politik luar negeri tersebut. Peran Indonesia terhadap anti-penjajahan memang tidak terlepas dari peran Soekarno dan

Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Sikap keras Indonesia tersebut kemudian melekat menjadi identitas bangsa bahwa Indonesia akan berupaya sebaik mungkin untuk menghapus penjajahan dari dunia (Ubani, 1972).

Dalam sejarah politik luar negeri Indonesia, Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang mengungkapkan keinginan untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Rencana kebijakan Gus Dur tersebut tidak mendapatkan dukungan dari sebagian besar pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal yang dianggap aneh adalah ketika mayoritas negara-negara Islam khususnya menolak Israel, Indonesia di bawah pemerintahan Gus Dur justru berkeinginan untuk berhubungan dengan Israel. Ide tersebut memang dapat dipandang sangat berlainan dengan arahan presiden Soekarno atau Soeharto (tempo.co.id).

Apabila Soekarno menolak dengan tegas eksistensi Israel maka Gus Dur berkeinginan untuk mengakui eksistensi Israel dengan sebuah kerjasama. Soekarno menolak dengan tegas kerjasama terhadap Israel atas dasar Israel dikategorikan oleh Soekarno sebagai penjajah Palestina. Kemudian pada era Soeharto, Israel tetap tidak termasuk sebagai negara yang menjadi perhatian dalam kerjasama. Meskipun memang ada isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel pada era-nya namun Soeharto tidak pernah menyatakan secara tegas terkait keinginannya. Atas dasar tersebut muncul kemudian pandangan-pandangan negatif terutama dari sebagian besar masyarakat muslim terhadap Gus Dur dalam isu ini (Faris Alfadh, 2012).

Diantara penyebab-penyebab hambatannya adalah terdapat penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang menilai ide tersebut sangat bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia karena kategorisasi penjajahan tersebut. Kemudian perbedaan mayoritas penduduk antara Yahudi dengan Islam juga sangat besar pengaruhnya dalam penolakan wacana kebijakan tersebut. Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, namun penduduk mayoritasnya adalah Islam (tempo.co.id).

Pada dasarnya politik luar negeri dan politik dalam negeri akan saling berpengaruh dalam suatu negara. Pembukaan hubungan diplomatik merupakan sebuah politik luar negeri sehingga akan berpengaruh pula terhadap politik dalam negeri. Politik luar negeri akan mengarah pada upaya pencapaian kepentingan nasional. Dalam melakukan politik luar negeri pula terdapat berbagai landasan yang dijadikan pedoman untuk tetap sesuai dengan konstitusi yang telah dibuat dalam negara tersebut (Sabir, 1987).

Indonesia tidak mungkin melanggar prinsip sendiri yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk menghapus penjajahan (Kaelan, 2010). Namun apabila melihat prinsip bebas aktif yang memang memiliki multi-interpretasi, tentu terdapat alasan yang wajar bahwa pembukaan hubungan diplomatik dapat dengan sah dilakukan dengan siapa saja selama terdapat kepentingan nasional. Sebagai presiden, apakah Gus Dur tidak mengetahui kuatnya pandangan negatif masyarakat terhadap penjajahan Israel? apa yang difikirkan Gus Dur ketika itu?

Bagaimanapun juga ide tersebut diungkapkan secara terang-terangan oleh sosok Gus Dur. Sebelum menjadi presiden, sosoknya merupakan tokoh yang

berpengaruh di Indonesia. Gejolak politik orde baru telah memberikan banyak pengaruh besar bagi sejarah Indonesia. Meskipun terdapat prestasi, berbagai masalah yang tidak teratasi, terus memberikan dampak buruk besar bagi pemerintahan selanjutnya. Suatu beban bagi seorang Gus Dur karena beliau harus mengupayakan perbaikan di segala sisi (Forrester, 1999).

Munculnya Gus Dur memang diharapkan terdapat membawa Indonesia ke sebuah arah yang lebih baik namun kebijakan Gus Dur cenderung juga belum bisa menyelesaikan semua sisa masalah. Hal itu diakibatkan oleh banyak faktor yang diantaranya adalah kurangnya kepercayaan terhadapnya seperti kuatnya penolakan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini kemudian ditunda karena Gus Dur telah turun terlebih dahulu dari jabatan kursi kepresidenan di Indonesia ketika itu (kompasiana.com).

Bagaimanapun juga tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indonesia aktif melakukan impor-ekspor dengan Israel sejak tahun 2000. Pada tahun 2015 Indonesia mengekspor barang senilai US\$ 116.7 juta dan mengimpor barang senilai US\$ 77.7 juta (bbc.com). Data ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada hubungan diplomatik, terdapat hubungan dagang Indonesia-Israel hingga kini.

Hal yang kemudian menarik adalah munculnya kembali isu tersebut melalui Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang mewacanakan kepada publik terkait akan dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel saat menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia (Senin, 28/3/2016) (kompas.com). Meskipun memang hanya baru pada tahap rencana, dampak yang ditimbulkan oleh ide tersebut masih terus terasa hingga kini.

Wakil menlu Israel Tzipi Hotovely mengatakan bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik secara rahasia namun Indonesia bersikap tegas bahwa tidak ada hubungan rahasia tersebut melalui pernyataan Menlu bahwa kementerian luar negeri tidak pernah, garis bawah, tidak pernah ada pertemuan itu. Presiden Jokowi juga mendukung sikap tegas penolakan dengan meminta OKI untuk terus menekan Israel demi meningkatkan dukungan terhadap Palestina (bbc.com). Apapun kemungkinan yang terjadi baik itu konspirasi atau memang fakta munculnya kembali isu tersebut menunjukkan adanya peluang pembukaan hubungan diplomatik.

Atas dasar tersebut artikel ini berupaya untuk mencari penjelasan apa faktor-faktor pembentuk pemikiran politik Gus Dur ketika itu hingga dapat memunculkan ide pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang hingga kini banyak menuai kritikan terhadap wacana kebijakan tersebut. Atas dasar latar belakang tersebut maka penelitian ini ingin menjelaskan apa faktor-faktor pengaruh pemikiran politik Gus Dur terhadap ide pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Artikel ini akan menjelaskan alasan mengapa muncul pemikiran politik Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel.

Artikel ini menggunakan konsep pemikiran politik sebagai kerangka pemikiran. Konsep itu sendiri merupakan sebuah representasi abstrak dari sesuatu (Sudarminta, 2002). Dalam penjelasannya pemikiran merupakan aplikasi rasio

manusia yang dihasilkan dari berbagai premis yang diketahui untuk mendapatkan berbagai konklusi yang belum diketahui (Abd. Qodir Hamid, 2001). Maksudnya adalah pemikiran seseorang akan didasarkan pada keyakinan dan pandangan umum yang dipegang oleh orang tersebut. Politik itu sendiri merupakan sebuah upaya dalam menentukan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat kebijakan-kebijakan dan cara-cara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan yang kemudian hasil dalam bentuk baiknya adalah sebuah keadilan dan kesejahteraan (Budiardjo, 2008).

Maka sebuah pemikiran politik menurut Abdul Qodir Tijani merupakan pemikiran atau ide yang ada dalam diri manusia untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh masyarakat. Permasalahan tersebut tentunya tidak terlepas dari kajian politik berupa hubungan antara negara dengan negara atau negara dengan masyarakat. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran politik berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan politik (Abd. Qodir Hamid, 2001).

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Masri dan Sofian Efendi, 1998). Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa perilaku politik (sikap politik) mengandung pengertian yang kompleks berkenaan dengan aktornya baik masyarakat ataupun pemerintah. Perilaku politik juga memiliki tiga unit analisis meliputi aktor politik, agregasi politik, dan topologi kepribadian. Secara garis besar perilaku politik berkaitan dengan kegiatan dalam pembuatan dan pelaksanaan kegiatan politik (Sujiono, 1995).

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori perilaku politik yang dapat menjelaskan bahwa aktor politik dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sosial politik (langsung dan tak langsung), struktur kepribadian, dan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi sikap politik (Ramlan, 1999). Untuk lebih jelas maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

a. Lingkungan Sosial Politik Langsung (Latar Belakang Biografis)

Pada dasarnya lingkungan sosial politik langsung dapat berupa latar belakang biografis seseorang. Hal ini disebabkan sejarah dan aspek-aspek yang telah didupakannya akan membentuk karakter yang kemudian dapat diinterpretasikan melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Diantaranya merupakan Latar Belakang Keluarga, Lingkungan Sekolah (teman bergaul), Lingkungan Pemerintah, Kontemplasi dan Agama, Pendidikan, Pengalaman

b. Lingkungan Sosial Politik Tidak Langsung

Faktor ini merupakan pengaruh yang secara tidak langsung turut memiliki dampak. Faktor ini cenderung berupa sistem, seperti politik, ekonomi, budaya, atau media. Secara garis besar, sebuah sistem merupakan sebuah kerangka yang akan membentuk aktor atau pihak yang terlibat tunduk atau menuruti sistem yang telah dibuat. Contoh yang dapat digambarkan adalah sistem monarki absolut dalam sebuah pemerintahan cenderung akan membuat pemimpin lebih bersikap otoriter.

c. Struktur Kepribadian

Struktur kepribadian menjelaskan bahwa aktor memiliki determinan personal yang dapat menunjukkan karakter kepribadian aktor tersebut. Hal tersebut diakibatkan akan adanya keteraturan perilaku yang dihasilkan dari individu. Beberapa komposisi yang dapat menunjukkan identitas aktor adalah kognisi, motivasi, afek, ego, sikap, dan lain-lain. Contoh yang dapat digambarkan adalah terdapat perbedaan determinan personal antara presiden Soeharto dengan presiden SBY meskipun sama-sama memiliki latar belakang militer.

d. Lingkungan Sosial Politik Berupa Kondisi Atau Situasi

Pada faktor ini, yang mempengaruhi perilaku atau sikap aktor tersebut adalah situasi atau kondisi. Contoh yang dapat digambarkan adalah seperti kondisi kekacauan sistem politik akibat G30 SPKI yang kemudian mempengaruhi sikap dan tindakan Soekarno untuk memberikan mandat kepada Soeharto.

Faktor-faktor pengaruh perilaku politik tersebut menyebabkan aktor untuk mengambil pilihan keputusan politik. Faktor-faktor tersebut akan membentuk pola pemikiran politik seseorang yang kemudian akan mengimplementasikan pemikirannya ke dalam sebuah realitas tindakan politik.

Artikel ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi Gus Dur yang kemudian dari hasilnya akan dapat diketahui bagaimana pola pikir Gus Dur yang kemudian dapat menjelaskan mengapa muncul pemikiran politik Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Pendekatan ini sangat relevan untuk membahas pemikiran politik Gus Dur terhadap ide pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel.

Dalam mengkaji pokok pembahasan penelitian maka tentu diperlukan mekanisme bagaimana data tersebut diperoleh dan dikaji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mengandung penjelasan bahwa penelitian dilakukan dengan menggambarkan, menerangkan, menganalisis, melakukan pencarian data, dan mengkalifikasikan data sesuai dengan kebutuhan dalam membahas penelitian. Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat kualitatif. Teknik analisa yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teknik analisa kualitatif. Teknik analisis data terdiri dari tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Berdasarkan hubungan dengan obyek penelitian, artikel ini menggunakan metode *historical-comparative research*. Penelitian dengan metode tersebut menggunakan pendekatan sejarah dalam sebuah penjabaran untuk mengkaji sebuah fenomena yang terjadi. Pengkajian penelitian dikhususkan pada periode pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Faktor Pengaruh Internal

Gus Dur merupakan anak dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan HJ. Solechah. Gus Dur merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Kakeknya adalah KH. Hasim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri Pesantren Tebuireng, Organisasi Islam NU (Nahdhotul Ulama') dan merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional. Sedangkan ayahanda Gus Dur, KH. Wahid Hasyim merupakan pejuang pergerakan nasional, yaitu seorang Menteri Agama RI yang pertama tahun 1949 dan salah satu perumus Piagam Jakarta. Ibunda Gus Dur, HJ. Sholechah adalah putri pendiri

pondok pesantren Denanyar di Jombang Jawa Timur. Kemudian kakek dari ibunya Gus Dur, KH. Bisri Syamsuri merupakan pengajar pesantren pertama khusus untuk kaum perempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sosok Gus Dur memang hidup di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai agama dan nilai nasionalisme.

Latar belakang pendidikan beliau dimulai dengan menempuh pendidikan formal di SR (Sekolah Rakyat) tahun 1953 di Jakarta. Kemudian tahun 1953-1957, Gus Dur belajar sekolah menengah ekonomi pertama (SMEP) di Yogyakarta. Beliau menimba ilmu pesantren di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah yang kemudian pindah ke pesantren Mu'allimat Bahrul Ulum di Jombang, Jawa Timur sampai dengan tahun 1963. Kemudian beliau juga pernah di Pesantren Krapyak di Yogyakarta dan menimba ilmu dengan Kiayi terkemuka K.H. Ali Ma'sum. Kemudian pada tahun 1964 Gus Dur berangkat ke Kairo, Mesir untuk mengambil studi Islam dan bahasa Arab di Universitas Al Azhar. Setelah itu beliau pindah ke Universitas Bagdad dengan mengambil fakultas Sastra dan Budaya Arab (Umaruddin Masdar, 1999).

Dalam perjalanan pendidikan ternyata Gus Dur tidak hanya aktif sebagai pelajar namun beliau juga pernah menjadi guru dan penceramah. Gus Dur pernah menjadi guru di pondok pesantren Tambakberas di Jombang pada tahun 1974 dan di Al Hikam pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1977 Gus Dur bergabung dengan Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan di fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam. Di Universitas ini beliau juga mengajar keilmuan Islam. Selain aktif menjadi pengajar, beliau juga pernah aktif sebagai penulis di majalah Tempo dan harian Kompas. Diantara hasil karyanya adalah Bunga Rampai Pesantren (Dharma Bakti, 1979), Muslim di tengah Pergumulan (Leppenias, 1981), Kiai nyentrik membela pemerintah (LkiS, 1997), dan Tabayyun Gus Dur (LkiS, 1998) (Umaruddin Masdar, 1999).

Dalam perpolitikan Indonesia, Gus Dur juga merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam era transisi. Ketika Gus Dur telah terpilih sebagai ketua pengurus besar Nahdhotul Ulama' (PB NU) pada tahun 1994-1999. Gus Dur mulai mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat baik dalam skala nasional maupun skala Internasional. Di kalangan NU sendiri ketika itu memang menghendaki adanya perlawanan terhadap intervensi pemerintah. Salah satu yang mengangkat popularitasnya adalah selama karirnya dalam politik Gus Dur banyak berperan dalam perjuangan demokrasi dan sikap toleransi antar umat yang tinggi di Indonesia (Keith Loveard & Dirk Vlasblom, 1995). Gus Dur juga pernah bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan membentuk Fordem (Forum Demokrasi). Selain itu Gus Dur melalui dukungan dari NU juga telah membentuk partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (Ali Masykur M.,2008).

Di Indonesia, puncak karir politik Gus Dur berada pada kursi kepresidenan RI pada tahun 1999-2001. Selama menjadi presiden Republik Indonesia, Gus Dur banyak mengeluarkan kebijakan yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Berikut adalah beberapa determinan personal yang melekat pada diri Gus Dur secara umum.

1. Kontroversial (Nyeleneh)

Karakter ini tidak ditujukan untuk menjustifikasi Gus Dur sebagai orang yang kontroversial namun pengertian ini dimaksudkan bagaimana asumsi yang berkembang dalam masyarakat (Tim INCReS, 2000). Namun apakah benar bahwa Gus Dur memang sosok yang penuh dengan kontroversi? Tentunya perlu ada kajian mendalam secara obyektif dari berbagai sudut pandang dalam menilai kebenaran tersebut.

Berikut diantara beberapa hal yang dianggap oleh kontroversial bagi sebagian pihak yaitu mengganti sapaan dalam salam, revisi TAP MPRS No. XXV tahun 1996 mengenai PKI, pernyataannya mengenai DPR seperti taman kanak-kanak, menggunakan celana pendek dan kaos oblong setelah dilengserkan oleh MPR, dan masih banyak pernyataan-pernyataan dan langkah-langkah yang dianggap kontroversial bagi sebagian pihak.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai kontroversi yang dibuat Gus Dur menggugah orang untuk berpikir kritis dan mencerahkan masyarakat. Arie Sudjito menjelaskan bahwa setiap *joke* maupun pernyataan yang beliau sampaikan mengandung makna dan hikmah yang bisa diambil baik dari pernyataan maupun tindakannya.

Kemudian putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid menjelaskan bahwa gagasan atau pernyataan yang keluar dari Gus Dur sering dianggap kontroversial karena gagasan atau pernyataan tersebut telah melampaui zamannya dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda jauh ke depan dari orang lain. Pada kenyataannya semua didasari untuk tujuan korektif. Dan tentunya sikap kontroversi yang dilakukan oleh Gus Dur tidak mengurangi simpatisan dan dukungannya. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa paradigma kontroversi yang ditujukan untuknya bukanlah kontroversi dalam artian yang negatif melainkan untuk tujuan yang positif yang mungkin belum dapat dipahami dan dirasakan hikmahnya saat itu, tetapi akan meninggalkan warisan untuk generasi penerus bangsa (news.detik.com).

Selain lekat dengan kontroversi, Gus Dur juga sering dianggap sosok yang humoris. Gus Dur sangat gemar sekali dengan *joke*. Dalam setiap kesempatan Gus Dur selalu memiliki *joke* yang siap mengundang tawa bagi siapapun yang mendengarnya (kompas, 2000). Hal inilah yang mendukung kepribadian Gus Dur dalam berpolitik.

Joke yang beliau keluarkan dalam setiap kesempatan mengandung makna tersembunyi yang menambah kharisma Gus Dur dalam politik Indonesia. Beberapa pihak menilai setiap kontroversi yang dilakukan olehnya merupakan *joke* dalam politik sebagai upaya untuk mengenalkan maksud dan tujuan politiknya. Beberapa pihak lain menilai bahwa Gus Dur memang tokoh politik yang nyeleneh. Terlepas dari pandangan masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa inilah cara Gus Dur dalam berpolitik. Hal inilah yang kemudian dapat dianalisis untuk menemukan pola pemikiran Gus Dur.

Gus Dur sendiri dalam sebuah acara televisi talk show di Metro TV bernama “Kick Andy“ menjelaskan bahwa beliau tidak mempedulikan tanggapan mengenai kontroversi tersebut. Yang beliau lakukan hanyalah mengemban amanah undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa tujuan dari kebijakan-kebijakan beliau adalah salah satu upaya untuk memajukan Indonesia (YouTube.com).

2. Pluralis dan Humanis

Pluralis merupakan sikap hidup manusia yang mempertahankan kondisi kemajemukan dengan apa adanya lengkap dengan konsekuensi terjadinya gesekan-gesekan antara isme yang ada di dalamnya (kompasiana.com). Sedangkan Humanis merupakan suatu istilah yang ditujukan terhadap orang yang memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan, pengabdian kepentingan sesama umat manusia.

Arti kata lain menjelaskan humanis merupakan penganut paham yang menganggap manusia sebagai obyek terpenting (kbbi.web.id). Gus Dur memiliki komitmen dalam gagasan dan tindakannya terhadap pembelaan kaum minoritas, mewujudkan terciptanya keadilan masyarakat, menghargai perbedaan, memperjuangkan demokrasi, dan penegakkan hak asasi. Selain itu beliau juga dikenal sederhana dengan dekat dengan rakyat. Sikap inklusif dan egaliter sangat melekat dalam diri Gus Dur sehingga tidak mengherankan apabila Gus Dur dikenal dengan sosok yang humanis dan pluralis (kbbi.web.id).

Prinsip tersebut yang kemudian akan mengarah kepada pembentukan setiap langkah dan keputusan politik yang diambil oleh Gus Dur. Sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana sikap politik Gus Dur terhadap konflik separatisme Aceh, papua, dan pembelaan terhadap etnis Tiongkok di Indonesia.

Ketika era orde baru mengekang kebebasan warga negaranya maka Gus Dur berupaya untuk memperjuangkan kebebasan tersebut (Tim INCRes, 2000). Perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan hingga beliau telah menjadi presiden dengan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kepentingan umat. Sikapnya yang risih dengan konflik yang berujung pada kekerasan dan perpecahan turut mendukung sikap-sikap yang dimilikinya. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Gus Dur memiliki prinsip *non-violance* Bahkan Gus dur sendiri pernah tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang humanis (kbbi.web.id).

3. Liberalis

Dalam konteks ini liberal merupakan bersifat bebas atau berpandangan bebas (luas dan terbuka) (kbbi.web.id). Menurut Gus Dur liberalisme dapat menjawab tantangan modern. Menurutnya hukum Islam harus dinamis sesuai dengan relevansi perkembangan sosial dan tidak menutup diri (konservatif atau tradisional). Pemikir islam yang berkembang ketika itu cenderung mengedepankan hukum yang sudah ada tanpa adanya perhatian terhadap relevansinya. Kemudian dalam bermadzhab Syafi'i, Gus Dur juga menekankan selayaknya tidak hanya

mengikuti pendapatnya saja namun juga harus memperhatikan metode (manhaj) dalam proses hukum tersebut. Hal itu diyakini oleh Gus Dur karena Islam bersifat universal.

Gus Dur juga dianggap liberal ketika gagasannya mengenai penggantian salam dalam sapaan, pembelaan dan sikapnya terhadap pemeluk agama non-Islam karena menurutnya manusia tidak bisa menghakimi sebuah agama karena yang menciptakan agama adalah tuhan, dan ketika Gus Dur menyebutkan bahwa NU pada dasarnya adalah Syi'ah Kultur. Semua gagasan tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip Islam khususnya prinsip Aswaja (Ahlu Sunnah Wal Jama'ah). Pandangan Gus Dur mengenai kaidah beragama dan toleransi beragama bagi sebagian pihak dinilai sangat liberal dan sekular (Greg Barton, 1997).

Liberalisme dekat dengan Gus Dur karena memang pengetahuannya yang luas akan pemikiran barat. Saat usia remaja, Gus Dur sudah membaca buku-buku berisi pemikiran barat seperti "What is to be done" karya Lenin, "Captain's Daughter" karya Turgenev atau "Das Capital" karya Karl Marx (Tempo, 1989). Meskipun Gus Dur berasal dari keluarga yang mengedepankan agama dan budaya pesantren namun Gus Dur tidak menutup mata terhadap kemajuan dan peradaban barat. Pemikiran Gus Dur bagi sebagian orang bahkan dianggap melampaui batas. Pemikirannya akan tajdid, sekularisasi agama, reaktualisasi hukum Islam, dan sikap pluralisme agama pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam sendiri karena Gus Dur memiliki dasar fiqh yang kuat (Tim INCRes, 2000).

Pemikiran Gus Dur dianggap liberal karena pemikirannya dianggap menyimpang dari ajaran agama oleh sebagian masyarakat khususnya tradisional. Makna liberal kemudian mengarah kepada pemikiran yang negatif bagi asumsi sebagian masyarakat. Namun dalam konteks ini liberal lebih diartikan sebagai pemikiran yang tidak konservatif atau fundamentalis. Terlepas dari apakah pemikiran tersebut negatif atau positif, liberal membantu menjelaskan sikap yang diambil oleh Gus Dur dalam setiap langkah politiknya khususnya ketika diakibatkan dengan urusan agama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya maka pada dasarnya pemikiran Gus Dur kembali kepada tujuan politik yang bersifat mengutamakan kemaslahatan dalam pluralistik. Dengan dasar ilmu pengetahuan tersebut kemudian Gus Dur mencoba menerapkannya dalam sebuah tindakan nyata.

Gus Dur merupakan sosok pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan agama dan politik. Gus Dur menegaskan kedudukan antara agama dan politik sebagai berikut:

"Hukum agama tidak akan kehilangan kebesarannya dengan berfungsi sebagai etika masyarakat. Bahkan kebesarannya akan memancar, karena itu mampu mengembangkan diri tanpa dukungan massif dari institusi negara. Beragama Islam yang artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, adalah tujuan hidup yang luhur. Karenanya haruslah dihindarkan agar Islam tidak diletakkan dibawah wewenang negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Bukankah lalu menjadi sangat dalam maknanya sabda Nabi Muhammad, 'bahwasanya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan Ahklak'. Kemuliaan Ahklak hanyalah terasa logis untuk disempurnakan, jika upaya itu diartikan sebagai pengembangan kesadaran mendalam akan etika sosial dari suatu masyarakat bangsa" (Abdurrahman Wahid, 1989).

Dalam konteks tersebut, Gus Dur ingin menjelaskan bahwa Islam sebagai agama memiliki kedudukan di atas negara. Hal tersebut bersifat mutlak untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam kemudian berfungsi sebagai etika sosial yang diharapkan dapat diterima oleh lapisan masyarakat yang dalam hal ini berupa Akhlak (perilaku) yang baik.

Dalam hal beragama, Gus Dur lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat substantif dengan menangkap esensi Islam yang mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan aktual masyarakat. Sebagai contoh apabila dikaitkan dengan Al Qur'an, maka tidak hanya sebatas menjaga teks-teksnya atau mengartikannya namun juga berupaya menangkap makna dan pesan disertai dengan relevansi kebutuhan umat (Shahhatah, 1963).

Faktor Pengaruh Eksternal

1. Konflik Israel-Palestina

Israel berdiri berawal dari upaya gerakan Zionis yang telah dirintis sejak tahun 1717 dalam mengumpulkan orang-orang Yahudi yang tersebar di dunia. Kemudian pada tahun 1986 secara resmi berdirilah gerakan Zionis tersebut dan pada tahun 1987 diadakan 1st Zionist Congress di Basel Swiss yang diprakarsai oleh Theodore Herzl. Perjanjian Sykes Picot pada tanggal 16 Mei 1916 merupakan perjanjian rahasia antara Inggris dan Perancis dengan persetujuan Rusia dalam kontrol Timur Tengah. Perjanjian itulah yang kemudian mengawali hak otoritas Inggris dalam mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Keputusan tersebut yang kemudian melahirkan konflik Israel-Arab (Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, Iraq, dan Palestina) dan konflik Israel-Palestina itu sendiri sebagai bentuk penolakan berdirinya negara Israel di tanah Palestina (Dir. Timteng Kemlu, 2014).

Tercatat pernah terjadi perang yang sangat besar antara Israel-Arab. Perang besar pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1948 hingga 7 Januari 1949. Perang tersebut melibatkan negara-negara Arab dengan Israel. Kemudian perang kedua terjadi pada tanggal 29 Oktober hingga 7 November 1956. Perang tersebut berkaitan dengan terusan Suez. Mesir yang ketika itu dipimpin oleh Jamal Abdel Nasser mengumpulkan kekuatan negara-negara Arab lain untuk menghadapi Israel yang kemudian titik puncak perangnya terjadi pada tanggal 5 sampai 10 Juni 1967 yang dikenal juga dengan istilah "perang 6 hari" (Asher Arian, 1998).

Dalam perang sebelumnya memang Israel telah memenangkan peperangan yang mengakibatkan melemahnya kekuatan negara-negara Arab. Namun ketika itu Mesir yang dipimpin oleh pemimpin barunya Anwar Saddad berhasil membalas Israel dengan sebuah kemenangan dan menghasilkan intervensi dari PBB melalui Dewan Keamanan dengan Resolusi No. 338 sebagai penegasan resolusi dari 242 untuk perdamaian antara Mesir dan Israel (Ibnu Burdah, 2008).

Beberapa pihak menyebut bahwa tindakan Israel merupakan sebuah pelanggaran yang termasuk ke dalam kejahatan internasional. Hal tersebut tidak terlepas dari konspirasi dan teror yang dilakukan oleh Israel (Adian Husaini, 2004). Pada tahun 1980 Israel mendeklarasikan seluruh wilayah Jerusalem sebagai bagian dari Israel. Hal tersebut semakin membakar amarah masyarakat Palestina sehingga muncul pemberontakan yang dikenal dengan *Intifada'* (kompas.com).

Pemberontakan terjadi pada tahun 1987-1993 dan pada tahun 2000. Bentrokan tersebut menyebabkan tewasnya 3000 warga Palestina, 1000 warga Israel, dan 64 warga negara asing (Dir. Timteng Kemlu, 2014).

Upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina kemudian berlanjut kepada jalur Diplomasi. Beberapa upaya resolusi konflik Israel-Palestina melalui jalur diplomasi adalah melalui Perjanjian Oslo, perjanjian Camp David, dan KTT Riyadh. Baik melalui jalur diplomasi maupun *war*, konflik Israel-Palestina belum menemukan solusi yang mengikat (liputan6.com).

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur untuk menghapuskan penjajahan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pandangan Soekarno, Israel merupakan penjajah bangsa Palestina. Indonesia pasca Soekarno telah menetapkan prinsip kebijakan luar negeri terhadap kawasan Timur Tengah berfokus pada Catur Cita atau 4 pilar Utama yaitu kedamaian, kesejahteraan, demokratis, bebas dari nuklir dan senjata pemusnah massal. (Dir. Timteng Kemlu, 2014).

Sejak awal Soekarno telah mengobarkan semangat anti-Israel. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mendukung hal tersebut. Dalam hal ini Palestina merupakan bangsa yang terdiri dari mayoritas Muslim sehingga ada persamaan identitas yang membuat Soekarno lebih mengedepankan pembelaan terhadap Palestina daripada Israel. Hal tersebut dipertegas dengan penolakan delegasi Israel pada *Asian Games* di Jakarta tahun 1964 era Soekarno (Michael Leifer, 1986). Cita-cita untuk membantu Palestina merdeka dari Israel menjadi dasar politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Selain atas dasar persamaan identitas, Soekarno juga ingin menghormati dan membalas dukungan negara-negara Arab dan Palestina khususnya yang mengakui kedaulatan Indonesia ketika itu.

2. Kondisi Indonesia

Perlu diketahui bahwa pada orde baru Indonesia pernah mampu mencapai prestasi yang sangat membanggakan. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto ketika itu. Swasembada beras menjadi andalan Indonesia sehingga mampu menjadi negara besar pengekspor beras ke beberapa negara lain. Nilai rupiah ketika itu juga sangat menguat. Dalam perkembangannya kemudian berbagai dinamika pun muncul. Indonesia tidak mampu untuk tetap bertahan dalam keseimbangan dan jatu dalam krisis moneter yang berdampak pada era pemerintahan Gus Dur (Faisal & Haris Munandar, 2009).

Kedadaan buruk yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga 4.65% turut mempengaruhi berbagai macam permasalahan kriminalitas yang tidak terkendali seperti penjarahan dan perampokan. Hal itu berlanjut hingga era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto. Harga beras yang menjadi makanan pokok melonjak drastis dari Rp 1500 naik ke harga Rp 3500. Kemudian harga minyak goreng berada di atas harga beras dengan Rp 4000. Ditambah lagi dengan banyaknya pengangguran akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ketika itu menyebabkan masyarakat menengah ke bawah tidak

sanggup dalam memenuhi kebutuhan hidup. Atas dasar permasalahan tersebut maka Indonesia harus bergerak cepat untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sangat lemah. Keadaan tersebutlah yang turut menyebabkan beberapa pengaruh terhadap pemikiran politik Gus Dur.

Berakhirnya orde baru dengan sebuah kudeta oleh masyarakat pada dasarnya bukan merupakan solusi dalam mengatasi masalah yang muncul pada saat itu. Diantara permasalahan yang muncul adalah separatisme, marginalisasi sosial, konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan pertumbuhan ekonomi meningkat namun secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh karena lebih dikuasai oleh perusahaan asing daripada perusahaan domestik.

Selain kondisi politik dan sosial, orde baru juga melahirkan sistem implementasi konstitusi yang cenderung otoriter. Sistem otoriter merupakan rezim politik yang ditandai dengan pemusatan kekuatan politik di tangan sekelompok kecil elit yang tidak memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara institusional. Pemerintah cenderung membatasi kebebasan dan hak masyarakat yang kemudian menyebabkan Soeharto dipaksa untuk turun dari kursi kepresidenan Indonesia. Gejolak orde baru semakin kompleks dengan adanya penurunan secara paksa tanpa memperhatikan dan mempersiapkan kelanjutan pemerintahan Indonesia. Dengan turunnya Soeharto, maka Habibie sebagai wakil melanjutkan sisa pemerintahan dengan sekuat tenaga berupaya mengatasi permasalahan yang ada (Heru, 2010).

3. Peluang Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik merupakan sebuah hubungan yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi kepentingan suatu negara atau sama-sama saling memiliki kepentingan. Perwakilan diplomatik akan melakukan tugas berupa representasi, negosiasi, observasi, proteksi, dan pelaporan. Hubungan dapat juga ditujukan untuk meningkatkan hubungan antar dua negara tersebut (Wirjono, 1967).

Syahmin AK. menjelaskan bahwa terdapat informasi yang harus diberikan oleh negara yang sudah melakukan sebuah hubungan diplomatik. Dalam hal ini pembukaan hubungan memungkinkan negara untuk dapat saling mempengaruhi dan menekan satu sama lain tergantung pada kepentingan negara (Syahmin, 1984).

Selain atas dasar peran dan fungsi diplomatik, ketertarikan Israel juga mempengaruhi pemikiran politik Gus Dur. Berikut beberapa faktor yang membuat Israel tertarik terhadap Indonesia (Riza, 1997) Penduduk Muslim Terbesar, Ketua Gerakan Non-Blok (1991-1994), Pemulihan Ekonomi-Politik.

Diantara peluang yang ada, hubungan Gus Dur dengan Israel merupakan alasan kuat munculnya ide tersebut. Hubungan Gus Dur-Israel didasari oleh hubungan sosial dimana sebagai sesama makhluk yang diciptakan. Selain wawasan dan pengetahuan yang luas akan pemikiran barat, Gus Dur juga tidak memilih-milih dalam hal pertemanan sehingga tidak heran apabila Gus Dur cukup dekat dengan

Israel. Hal ini didukung pula dengan kepribadian Gus Dur yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Sosok humanis Gus Dur menyebabkan terciptanya kedekatan Gus Dur dengan Israel. Bukti kedekatan tersebut dapat terlihat pada akhir Oktober 1994 dimana 4 tokoh Islam Indonesia dipanggil ke Tel Aviv untuk menghadiri seminar tentang perdamaian yang diselenggarakan oleh Institut Harry S. Truman. Kemudian ke 4 tokoh tersebut juga menjadi saksi penandatanganan perjanjian perdamaian Yordania-Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat. Ke 4 tokoh tersebut adalah Habib Chirzin (Muhammadiyah), Djohan Efendi (Departemen Agama), Bondan Gunawan, dan yang terakhir adalah Gus Dur (Nahdhotul Ulama'). Selain itu mereka juga mengadakan pembicaraan rahasia dengan Wakil Menlu Israel (Riza, 1997).

Kedekatan Gus Dur dengan Israel merupakan sebuah keuntungan apabila dikaitkan dengan upaya peluang pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. secara tidak langsung semua aspek-aspek peluang hubungan diplomatik turut mempengaruhi munculnya pemikiran politik Gus Dur. Semua faktor eksternal tersebut baik lingkungan sistem maupun kondisi pada saat itu menyediakan pilihan yang besar kemungkinan mempengaruhi pemikiran politik Gus Dur selain pengaruh karakter Gus Dur sendiri.

Pemikiran Politik Gus Dur

Dalam pemikiran politik Gus Dur, terdapat 2 strategi yang ingin diwujudkan dalam pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. strategi tersebut adalah untuk membangkitkan kembali kondisi Indonesia yang secara ekonomi dan politik diambang kehancuran dan untuk menjadi mediator bagi konflik Israel-Palestina sebagai implementasi mewujudkan kemerdekaan Palestina (muslimmoderat.com).

Apabila Indonesia secara tegas mendukung Palestina dalam konflik Israel-Palestina maka bagaimanakah posisi Gus Dur dalam konflik tersebut? Apakah benar bahwa Gus Dur adalah pendukung Israel?

Seperti pada era Soeharto, tuntutan masyarakat Indonesia khususnya mengarah kepada upaya penghapusan negara Israel. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kemustahilan bagi Soeharto dan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh yang berkarakter kuat. Gus Dur lebih menekankan pada aksi nyata daripada mempertimbangkan langkah yang akan diambil. Hal inilah yang menyebabkan beberapa langkahnya dipandang kontroversial. Selain masyarakat yang kurang mengenal prinsip Gus Dur, tindakan yang mandiri tanpa konsultasi komprehensif menyebabkan tujuan baiknya tidak tersampaikan dengan baik (Ganewati dkk. 2008).

Israel merupakan negara yang kuat. Untuk membantu Palestina menuju kemerdekaan maka perlu upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Hal inilah yang menjadi titik dasar bagaimana Gus Dur berpandangan. Gus Dur lebih menyukai tindakan *soft diplomacy* daripada kekerasan melalui militer. Sikap yang Gus Dur berikan terhadap masyarakat Aceh dan Papua sebagai upaya resolusi konflik separatisme dan upaya penyelesaian kasus TKI yang berkembang di era-

nya dapat dinyatakan merupakan sebuah keberhasilan. Upaya meredam konflik dengan memperhatikan suara minoritas memang menjadi bagian dari pandangan pluralisme Gus Dur (nu.or.id).

Gus Dur sendiri juga mengetahui bahwa Israel merupakan negara yang sangat hebat. Untuk itulah pembukaan hubungan diplomatik dianggap sebagai pilihan tepat dalam rangka mengambil nilai positif yang dimiliki Israel terutama dalam sektor pendidikan yang bagi Gus Dur merupakan salah satu sektor yang penting. Menurut James S. Coleman, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Gus Dur merupakan tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan. Maksudnya adalah Gus Dur tidak menghiraukan pilihan-pilihan yang ada melainkan mementingkan tujuan dengan tetap memperhatikan tingkatan pilihan aktor. Indonesia seharusnya tidak lagi hanya mengutuk dan mengkritik namun juga melakukan tindakan nyata berupa upaya negosiasi dan menekan Israel dalam bentuk siasat dan taktik politik (Muhammad Ibrahim, 2012).

Gus Dur terlibat dalam pembentukan Komisi Tiga Agama (Islam, Kristen, dan Yahudi) sebagai upaya percepatan perdamaian konflik Israel-Palestina. Kesepakatan tersebut tercatat pada pertemuan informal di Perancis. Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang dipercaya mewakili Islam bersama Choiri Jambek dari Yordania dan Syekh Sulaiman dari London. Tugas utama komisi tersebut adalah memberi berbagai masukan terhadap percepatan perdamaian konflik Israel-Palestina termasuk merumuskan solusi konkretnya.

Menurut Gus Dur upaya kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Menurutnya pula bahwa pemikiran radikalisme Islam juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kedua hal tersebut sesuai dengan pemikiran Gus Dur yang telah dibahas sebelumnya. Alasan tersebut sangat menunjukkan upaya Gus Dur melalui jalur diplomasi dalam menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Apabila tindakan kekerasan tetap dipaksakan maka yang akan menjadi korban adalah rakyat Palestina. Bagi Gus Dur pembelaan terhadap hak asasi adalah yang utama sehingga tentunya sikap Gus Dur sangat menolak perang yang dapat membunuh manusia (jawa pos).

Dari semua faktor pengaruh baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemikiran politik Gus Dur maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Gus Dur merupakan pemikiran Neo-Modernis Islam. Menurut Greg Barton, Gus Dur memiliki paradigma berfikir Neo-Modernisme Islam. Menurutnya ada 5 hal yang dapat menjelaskan bagaimana pemikiran tersebut (Greg Barton, 1997).

- Neo-Modernis adalah gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan, dan pembangunan. Dijelaskan bahwa aliran tersebut sangat kritis dalam menyikapi pembangunan seperti adanya ketidakadilan dan sebagainya.
- Neo-Modernisme tidak melihat barat sebagai ancaman atas Islam dan umatnya. Aliran ini berbeda dengan fundamentalis.

- Neo-Modernisme Islam mengakui semangat sekularisasi dalam pengertian bangsa dan negara. Pengertian ini kemudian lebih dijelaskan oleh Nurkholis Madjid bahwa sekularisasi bukan berarti merubah kaum muslim menjadi sekularis namun mengartikannya sebagai menduniawikan nilai-nilai yang sudah seharusnya bersifat duniawi (M. Kamal Hasan, 1987).
- Neo-Modernisme Islam mengedepankan pemahaman Islam yang lebih terbuka, Inklusif, liberal, afirmasi pluralisme masyarakat, dan signifikansi toleransi antar komunal
- Neo-Modernisme banyak mewarisi semangat Muhammad Abduh dalam rasionalisme ijtihad secara kontekstual.

Penjelasan tersebut semakin menguatkan bagaimana pola pikir Gus Dur terhadap pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Gus Dur cenderung tidak mempermasalahkan status Israel sebagai bangsa Yahudi yang dianggap bagi sebagian pandangan konservatif merupakan bangsa yang harus dihindari. Pemikiran akan nasionalisme Gus Dur berusaha mengedepankan kepentingan negara Indonesia dengan caranya sendiri. Prinsip pluralisme dan liberalisme yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya mengarahkan pemikiran Gus Dur untuk lebih terbuka terhadap negara lain.

Pemikiran politik mengarahkan untuk mengupayakan pencapaian tujuan politik. Nasionalisme yang terbentuk dalam diri Gus Dur mengarahkannya untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina. Gus Dur tidak menganggap Israel sebagai musuh namun menganggap Israel adalah bagian dari pluralitas umat yang sama-sama memiliki kepentingan. Hal ini juga terlihat dari pembahasan sebelumnya bagaimana Gus Dur membela kaum minoritas China yang terbelenggu hak asasinya pada era Soeharto. Dalam hal ini Gus Dur terlihat tidak menghubungkan konflik Israel-Palestina sebagai konflik agama melainkan sebagai konflik horizontal antara state dengan state. Telah dijelaskan juga dalam kaitan antara Islam dengan politik bagi Gus Dur itu sendiri yang tidak melihat pada kerangka namun lebih ke arah substansi. Pemikiran Gus Dur dalam kaitannya dengan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel lebih menuju kepada suatu tujuan politik.

Gus Dur dalam pemikirannya mengedepankan aspek kemaslahatan umat dalam pluralitas. Meskipun Gus Dur besar dalam lingkungan pesantren, pengetahuannya akan pemikiran barat sangat mempengaruhi paradigma berfikir Gus Dur. Dapat disimpulkan bahwa Gus Dur tidak membawa nilai-nilai Islam dalam konflik Israel-Palestina melainkan nilai perdamaian dunia. Bagi Gus Dur Islam lebih tinggi posisinya dan adanya Islam tidak menjadi faktor pemicu konflik. Hal ini dapat terlihat dari pandangan Gus Dur berikut mengenai Islam (M. Kamal Hasan, 1987):

- Islam adalah agama pembebasan (*a liberating religion*) yang membebaskan manusia dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi
- Islam sebagai agama pembebasan sepenuhnya kompatibel dengan demokrasi

- Demokrasi diterima sebagai sistem yang paling rasional dan realistis untuk mewujudkan terbentuknya suatu tata masyarakat yang adil, egaliter, dan manusiawi-sebagaimana dicita-citakan oleh Islam
- Prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pijakan dasar dalam sistem demokrasi juga diterima sebagai prinsip yang sangat sentral untuk menegakkan sistem dan nilai-nilai substansial dari demokrasi itu sendiri
- Kehadiran negara Islam (*Islamic State*) di Indonesia ditolak bukan semata-mata karena tidak adanya perintah langsung dari Al Qur'an dan Hadits untuk melakukan itu, tetapi karena kehadirannya juga bisa tidak bermakna kondusif bagi upaya mempertahankan integritas bangsa yang pluralistik
- Transformasi sosial-politik merupakan suatu keharusan sejarah. Namun Gus Dur adalah intelektual tipikal sunni yang menolak perubahan (transformasi atau reformasi) dalam bentuk revolusi fisik dan gerakan anarkis

Gus Dur cenderung hanya mendasarkan pemikiran pada realitas dan pengetahuan yang dimilikinya. Hal inilah yang menyebabkan penolakan keras bagi sebagian masyarakat Indonesia. Gus Dur selalu menghiraukan kecaman dan kritik terhadap pergerakan dan aksinya yang dianggap bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah kontroversi. Menurut Gus Dur, mendamaikan dua pihak yang bersengketa perlu adanya pendekatan terhadap dua pihak tersebut. Kedekatan Gus Dur dengan umat selain Islam merupakan bukti prinsip pluralisme umat. Hal ini merupakan bagian dari prinsip pluralisme Gus Dur yang tidak menghiraukan minoritas. Pemikiran sederhana yang beliau sampaikan dengan mendasarkan pada apa yang Gus Dur yakini. Keyakinan tersebut berasal dari pemikiran Islam yang beliau pahami sebagai agama universal.

Dengan demikian pemikiran Neo-Modernisme Islam Gus Dur mengarahkan Gus Dur kepada keinginan untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Dengan berbagai penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait bagaimana pemikiran Neo-Modernisme Islam maka secara sadar Gus Dur menanamkan dasar prinsip pluralisme, humanisme, dan liberalisme untuk sebuah tujuan politik. Pemikiran politik sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka pemikiran merupakan pemikiran yang keluar sebagai akibat dari permasalahan politik. Pemikiran politik akan mengupayakan sebuah resolusi untuk permasalahan politik tersebut. Dalam hal ini jelas sekali apa yang diupayakan Gus Dur adalah untuk menyelesaikan permasalahan politik tersebut yaitu konflik Israel-Palestina melalui upaya pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Melalui pembukaan hubungan diplomatik tersebut Indonesia dapat berperan menjadi mediator dalam konflik Israel-Palestina.

Prinsip-prinsip pluralisme, humanisme, dan liberalisme yang melekat dalam diri Gus Dur merupakan bagian dari pemikiran Neo-Modernisme Islam yang terbentuk berdasarkan faktor pengaruh latar belakang biografis dan kondisi serta sistem lingkungan luar. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh keilmuan barat dan keilmuan Islam yang diperolehnya dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. Nasionalis, reformis, dan religius merupakan pengaruh yang ditimbulkan akibat lingkungan keluarga, pemerintah dan pengalamannya dalam politik. Semua aspek yang mempengaruhi pemikiran politik tersebut kemudian menjadikan sosok Gus

Dur sebagai seorang tokoh yang pluralis, humanis, dan liberalis. Kondisi ekonomi dan sosial pasca orde baru dan beberapa faktor lain seperti besarnya peluang pembukaan hubungan diplomatik dan kedekatan Gus Dur-Israel merupakan prinsip-prinsip yang kemudian mengarahkan Gus Dur kepada pemikiran yang bersifat Neo-Modernisme Islam yang mengarahkan kepada ide pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel.

Penutup

Isu konflik Israel-Palestina merupakan isu yang besar khususnya dalam sejarah Islam. Penderitaan dan korban akibat konflik tersebut sangat besar jumlahnya. Konflik tersebut bermula sejak berdirinya negara Israel di wilayah Palestina. Atas dasar itu maka Israel dianggap sebagai penjajah karena telah merampas kedaulatan Palestina. Dengan berlandaskan pada amanat undang-undang maka Indonesia berkeinginan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan tersebut.

Setelah memosisikan Indonesia sebagai pihak Pro-Palestina maka Indonesia berupaya untuk mendukung Palestina dalam setiap kesempatan baik dalam forum regional maupun Internasional. Atas persamaan identitas sebagai bangsa muslim, dukungan terhadap Palestina merdeka tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia saja, namun juga dari masyarakat secara luas. Hal tersebut terlihat jelas dari bantuan-bantuan yang diberikan untuk Palestina.

Konflik Israel-Palestina merupakan sebuah permasalahan politik yang ingin diselesaikan oleh Gus Dur. Gus Dur memiliki strategi untuk melakukan hubungan dengan Israel untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gus Dur dapat dikategorikan sebagai sosok yang dekat dengan Israel. Pengalamannya dalam organisasi dan forum internasional yang kemudian mengarahkan Gus Dur untuk melakukan realisasi terhadap pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Atas dasar itu Gus Dur memiliki keyakinan bahwa pembukaan hubungan diplomatik tersebut merupakan strategi yang tepat untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Dalam hal ini ide pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel merupakan sebuah pemikiran politik. Pemikiran politik Gus Dur terkait pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam konflik. Mediator tersebutlah yang diharapkan dapat mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Pemikiran politik Gus Dur tentang pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gus Dur sendiri merupakan tokoh reformis pada era Soeharto. Selain seorang tokoh politik, Gus Dur juga seorang ulama besar. Gus Dur tidak hanya menguasai pemikiran Islam namun juga menguasai pemikiran barat. Hal tersebut diakibatkan atas dasar latar belakang pendidikan dan pengalamannya.

Kondisi krisisnya ekonomi, politik, dan sosial Indonesia akibat banyaknya permasalahan yang muncul pasca orde baru ketika itu menyebabkan Gus Dur berupaya untuk mengatasinya melalui berbagai kebijakan yang mendukung. Dengan membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel, maka diyakini dapat membantu untuk menyelesaikannya. Tidak hanya kondisi tersebut namun peluang

terbuka lebarnya pembukaan hubungan diplomatik dan kedekatan Gus Dur-Israel juga turut mempengaruhi pemikiran politik Gus Dur.

Semua pengalaman yang Gus Dur alami dalam hidupnya menjadikan Gus Dur sosok yang humanis, pluralis, dan liberalis. Selain itu Gus Dur juga lekat dengan kontroversi. Dalam kerangka pemikiran telah dijelaskan bahwa faktor-faktor pengaruh perilaku politik adalah latar belakang biografis, struktur kepribadian, kondisi, dan sistem yang terbentuk. Semua aspek tersebut digunakan oleh penulis untuk melihat pengaruh pemikiran politik Gus Dur yang disimpulkan dalam sebuah paradigma pemikiran.

Semua aspek tersebut membentuk pemikiran Gus Dur ke arah Neo-Modernisme Islam. Pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran fundamentalis dalam berbagai sudut pandang. Pemikiran Neo-Modernisme Islam lebih melihat substansinya terhadap suatu hal dengan aspek pluralisme, inklusifitas, dan liberal sebagai sebuah afirmasi terhadap perkembangan keilmuan Islam. Pemikiran tersebut merupakan perkembangan dari pemikiran fundamentalis atau konservatif.

Paradigma pemikiran politik Gus Dur yang bersifat Neo-Modernisme Islam membawa pemikiran politik Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Hal ini disebabkan pemikiran tersebut tidak mengarahkan Gus Dur untuk menentang Israel. Gus Dur tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan cara yang berbeda dari presiden sebelumnya. Pemikiran tersebut mengarahkan Gus Dur kepada sosok yang humanis, pluralis, dan liberalis. Ketiga aspek tersebut membentuk sosok Gus Dur yang memperjuangkan hak minoritas, mengedepankan toleransi antar umat beragama, dan berupaya menyelesaikan konflik dengan melihat segala sesuatu dari substansinya.

Bibliografi

- Amran. 2013. *Mengapa Gus Dur Dekat Dengan Yahudi?*,
http://m.kompasiana.com/amran/mengapa-gus-dur-dekat-dengan-yahudi-kearifan-gus-dur-sebagai-bapak-humanisme_552b38e2f17e611202d62422
diakses pada 12/04/2016 pukul 01.41 WIB.
- Bani, Aziz. 2015. *Pluralis dan Pluralisme Ternyata Jauh Sekali Bedanya*,
(http://m.kompasiana.com/baniaziz/pluralis-dan-pluralisme-ternyata-jauh-sekali-bedanya_550e0643a33311a62dba7e0d diakses pada 09/12/2015
pukul 13.44 WIB).
- Barton, Greg. 2001. *Indonesia's Difficult Transition and President Abdurrahman Wahid, Global Change, Peace, and Security*. England: Routledge.
- Basri, Faisal & Haris Munandar. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- BBC Indonesia News. 2016. *Perjanjian Rahasia Indonesia-Israel*,
(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160318_indonesia_perjanjian_israel_indonesia diakses pada 16/04/2016 pukul 09.41
WIB).
- BBC Indonesia News. 2016. *Hubungan Dagang Indonesia-Israel*,
(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indones

- ia_israel_netanyahu_diplomatik diakses pada 05/04/2016 pukul 09.41 WIB).
- Burdah, Ibnu. 2008. *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cholis, Nur. 2015. *Jika Saat Itu Presidennya Bukan Gus Dur*, (<http://www.Muslimmoderat.com/2015/09/jika-saat-itu-presidennya-bukan-gus-dur.html?m=1> diakses pada 4/4/2016 pukul 19.45 WIB).
- Detik News. 2016. *Belajar Dari Kontroversi Gus Dur*, (<http://news.detik.com/berita/1698528/belajar-dari-kontroversi-gus-dur> diakses pada 24/01/2016 pukul 08.37 WIB).
- Direktorat Timur Tengah KEMENLU RI. 2014. *Dukungan Indonesia Untuk Palestina*. Jakarta: CV Hilda.
- Dwiyanto, Heru. 2010. *Sejarah Kelas XII SMA*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Efendi, Djohan. 2015. *Memahami Beberapa Gagasan Kontroversi Gus Dur*, (<http://santrigusdur.com/2015/02/memahami-beberapa-gagasan-kontroversial-gus-dur/> diakses pada 24/01/2016 pukul 08.13 WIB).
- Hadiwahyu. 2015. *Kilas Balik Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 di Indonesia*, (<https://hadiwahyun.wordpress.com/2015/05/01/kilas-balik-krisis-ekonomi-tahun-1997-1998-di-indonesia/> diakses pada 12/04/2016 pukul 03.52 WIB).
- Hamdani, Muhammad Ibrahim. 2012. *Peran KH. Abdurrahman Wahid Dalam Misi Perdamaian Israel-Palestina* (bagian I), (<http://polhukam.kompasiana.com/politik/2012/12/27/2/519235/peran-kh-abdurrahman-wahid-dalam-misiperdamaian-israel-palestina-bagian-i.html> diakses pada 17/02/2016 pukul 20.49 WIB).
- Husaini, Adian. 2004. *Pragmatisme Dalam Politik Zionis Israel*. Khairul Bayan.
- Inayati, Ratna Shofi Dkk. 1998. *Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI*. Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan-LIPI.
- Islamilogic. 2012. *Sejarah Palestina*, (<http://islamilogic.wordpress.com./2012/11/23/sejarah-palestina/> diakses pada 06/11/2015 pukul 11.19 WIB).
- Kompas News. 2015. *Kekerasan Melebar ke Gaza, Hamas Deklarasikan Intifada*, (<http://print.kompas.com/baca/2015/10/10/Kekerasan-Melebar-ke-Gaza%2c-Hamas-Deklarasikan-Intida> diakses pada 08/11/2015 pukul 15.22 WIB).
- Kompas News. 2016. *Pernyataan Netanyahu Terkait Hubungan Diplomatik Indonesia-israel*, (<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/08121201/Hubungan.Indonesia-Israel.Polemik.menghangat.di.awal.pemerintahan.Gus.Dur#> diakses pada 04/4/2016 pukul 09.32 WIB).
- Liputan6. 2014. *Obama: Kami Mendukung Agresi Militer Israel ke Gaza*, (<http://m.liputan6.com/news/read/2080138/obama-kami-dukung-agresi-militer-israel-ke-gaza> diakses pada 06/11/2015 pukul 21.19 WIB).
- Mahbib. 2013. *Peran Gus Dur Dalam Misi Perdamaian Israel-Palestina*, (<http://nu.or.id/post/read/25625/diplomasi-gus-dur-lebih-baik> diakses pada 12/04/2016 pukul 03.52 WIB).

- Madji, M. Rofiq. 2012. *Jurus Dewa Mabuk Ala Gus Dur*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. S., Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- M. U., Ahmad Rizky. 2014. *Kajian Gus DUr-Erdogan*, (<http://www.gusdurian.net/id/article/kajian/Gus-Dur-Erdogan-dan-Israel/> diakses pada 15/02/2016 pukul 13.41 WIB).
- Musa, Ali Masykur. 2010. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga.
- Nabil, Emha. 2010. *Diplomasi Gus Dur Lebih Baik*, (<http://nu.or.id/post/read/25625/diplomasi-gus-dur-lebih-baik> diakses pada 12/04/2016 pukul 03.52 WIB).
- Nurcholis, Ahmad. 2015. *Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Jakarta: Gramedia.
- Purba, Supriadi. 2015. *Mendesak Negara Untuk Membuka Hubungan Diplomasi Dengan Israel*, (http://m.kompasiana.com/harapankasih/mendesak-negara-untukmembuka-hubungan-diplomasi-dengan-israel_5513f9eda33311fc6fba82c6 diakses pada 04/10/2015 pukul 09.32 WIB).
- Tempo Harian. 2015. *Alwi Shihab: Tidak Surut Meski Diprotes*, (<http://tempo.co.id/harian/profil/prof-alwis.html> diakses pada 28/11/2015 pukul 23.17 WIB).
- Tim INCReS. 2000. *BEYOND THE SYMBOLS Jejak Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tribun News. 2013. *Kenapa Gus Dur Ingin Kerjasama Dengan Israel? Ini Jawabannya*, (<http://lampung.tribunnews.com/2013/03/10/kenapa-gus-dur-ingin-kerjasama-dengan-israel-ini-jawaban-yenny-wahid> diakses pada 3/4/2016 pukul 11.51 WIB).
- Tsani, Ali Farhan. 2015. *Dukungan Palestina Untuk Kemerdekaan Indonesia*, (<http://mirajnews.com/id/artikel/dukungan-palestina-terhadap-kemerdekaan-ri/81753> diakses pada 02/02/2016 pukul 11.19 WIB).
- Ubani, Baharudin. 1972. *Diplomasi dan Politik Luar Negeri*. Damaskus: Badan Pembinaan Masyarakat KBRI Syria.
- Wahyudi, Herry. 2015. *Makna Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif*, (http://www.kompasiana.com/herrywahyudi/makna-politik-luar-negeri-indonesia-bebas-aktif_5500b200a333113772511b03 diakses pada 20/10/2015 pukul 11.00 WIB).
- Wibisono, Suryo. 2007. *Potensi Indonesia Dalam Resolusi Konflik Israel-Palestina; Peluang dan Tantangan*, (http://www.academia.edu/9948869/POTENSI_INDONESIA_DALAM_RESOLUSI_KONFLIK_ISRAEL_PALESTINA_PELUANG_DAN_TANTANGAN_ diakses pada 12/04/2016 pukul 03.59 WIB).
- Wuryandari, Ganewati dkk. 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.